

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DI KOTA SUKABUMI

Khairunnisa Alya Puspita^{1*)}, Ike Rachmawati²⁾, Hegia Sampurna³⁾

¹Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
Khairunnisa7101@gmail.com

^{2,3}Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang melibatkan beberapa aktor, salah satunya masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan ketepatan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan. Namun, berlakunya kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi belum memberikan hasil yaitu menurunnya timbulan sampah tiap tahunnya. Permasalahan tersebut salah satunya dapat disebabkan karena adanya implementasi kebijakan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat. Kemudian, ditemukannya perbedaan hasil dalam dua penelitian terdahulu, terkait pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi, serta pengaruhnya. Untuk mengukur implementasi kebijakan digunakan teori George Edward yaitu terdapat 4 dimensi diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sedangkan partisipasi masyarakat menggunakan teori Keith Davis yaitu terdapat 3 gagasan diantaranya Keterlibatan Mental dan Emosional, Motivasi Kontribusi, dan Penerimaan Tanggung Jawab. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat. Adapun jumlah sampel sebanyak 100 responden yang terbagi dari 7 kecamatan di Kota Sukabumi. Kuisioner penelitian ini adalah valid dan reliabel. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi kebijakan dan partisipasi masyarakat dikategorikan tinggi. Kemudian, terdapat pengaruh positif dan signifikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berdasar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap partisipasi masyarakat, dengan koefisien determinasi (R^2) yaitu sebesar 14.8%.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Sukabumi, Partisipasi Masyarakat, dan Pengelolaan Sampah.

ABSTRACT

Policy implementation is a policy process that involves the several actor, one of which is citizen. Citizens participation turn out to the success and accuracy affecting factors of policy to achieving goals. However, the enactment of waste management policy in Sukabumi City has not given a result in the amount of waste decrease in every year. It could be due to implementations affecting to citizens participation. Afterwards, there are gap between two results in previous researches related to the influence of waste management policy implementation on public participation which it need more research. This research aims to known the waste management policy implementation in Sukabumi City, Citizens participation on waste management in Sukabumi City, and the influence of policy implementation and Citizens participation in Sukabumi City. George Edward Theory used to quantify the policy implementation, there are 4dimension inculdings communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Meanwhile Citizens Participation used Keith Davis Theory, there are 3 idea inculdings mental and emotional involvement, motivation to contribution, and responsibility. This researched used quantitative by distributing questionnaires to the public. As for the number of samples are 100 respondents which is devided into 7 Sukabumi City Districts. The questionnaires are valid and reliable. The result of this research are the waste management policy implementation and Citizens participation have high categorized. Then, there is the influence of waste management policy implementation based on communication, resources, disposition, and bureaucratic structure on Citizens participation with 14.8% of R^2 .

Keywords: Citizens Participation, Sukabumi City, Policy Implementation, and Waste Management.



PENDAHULUAN

Keberadaan manusia dan sampah tidak dapat dipisahkan. Hampir segala jenis kegiatan yang dilakukan manusia menghasilkan sampah. Sampah yang merupakan segala material sisa yang dihasilkan dari kegiatan manusia tersebut, hingga saat ini, selalu menjadi permasalahan global yang tidak kunjung usai. Populasi manusia yang terus meningkat mempengaruhi volume sampah yang terdapat di bumi. Pada dasarnya manusia cenderung berperilaku membuang sampah sembarangan. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan. Maka diperlukan penanganan lebih lanjut terhadap permasalahan dimaksud. Salah satu bentuk penanganannya yaitu dengan memberlakukan kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan sampah.

Negara Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan penduduk terpadat di dunia, juga sedang dihadapi dengan persoalan sampah. Timbulan sampah mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2020 sebesar 32,8 juta ton/hari, hingga di tahun 2021 menjadi 41,2 ton/hari nya (Kementerian Lingkungan Hidup 2021). Pemerintah Indonesia dalam upaya penanganan sampah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang tersebut dibentuk karena pengelolaan sampah belum sesuai dengan metode dan teknik berwawasan lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, permasalahan sampah termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren yang kewenangannya diserahkan ke Daerah. Hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan Otonomi Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur mengenai permasalahan sampah di daerahnya masing-masing, yang tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Salah satu contoh yaitu Kota Sukabumi, telah memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) peraturan daerah dimaksud, ruang lingkup sampah yang diatur dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik.

Pada hakekatnya kebijakan publik terdiri dari dua frase kata yaitu 'kebijakan' dan 'publik'. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan itu berasal dari kata bijak yang artinya "rangkaiannya konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana di pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak". Sedangkan kata publik artinya "orang banyak". Dari definisi tersebut dapat dikatakan kebijakan publik merupakan serangkaian konsep dasar atau asas dari suatu kegiatan yang dilakukan oleh khalayak umum/masyarakat dalam melakukan suatu tindakan. Sama halnya dengan definisi yang dikemukakan Anderson (1979) yaitu kebijakan publik merupakan "suatu tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seorang atau sekelompok aktor dalam menangani masalah atau masalah yang menjadi perhatian". Tentunya, kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah memiliki tujuan dan juga diharapkan dapat berdampak secara luas. Agar hal tersebut tercapai, suatu kebijakan harus melalui beberapa tahapan yang saling berkesinambungan. Mulai dari tahapan perumusan, implementasi, hingga evaluasi.

Pada proses kebijakan, Implementasi adalah tahap setelah kebijakan ditetapkan. Lester (1996) mendefinisikan implementasi sebagai "tahapan proses kebijakan segera setelah undang-undang disahkan". Implementasi kebijakan menjadi salah satu tahap yang dapat menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Akib (2012) menjelaskan bahwa "Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dikaji pada proses implementasi (perspektif proses) serta hasil yang dicapai (perspektif hasil)". Pada akhirnya implementasi akan menentukan keberhasilan dan juga efektivitas kebijakan itu sendiri. Maka dalam kasus ini, penerapan kebijakan pemerintah terkait sampah diharapkan dapat menghasilkan

keluaran (*Output*) yaitu menurunnya jumlah timbulan sampah. Melalui kebijakan yang telah diterbitkan, masyarakat diharapkan dapat menyadari pentingnya pengelolaan sampah. Akan tetapi yang terjadi di Kota Sukabumi, dirasa masih belum mampu memberikan *output* yang sesuai. Tercatat dalam data milik Kementerian Lingkungan Hidup, jumlah timbulan sampah di Kota Sukabumi terus meningkat tiap Tahunnya.

Tabel 1. Data Timbulan Sampah Kota Sukabumi

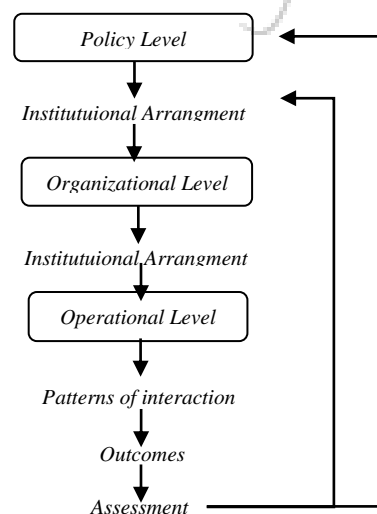
No	Tahun	Ton/Hari	Ton/Tahun
1	2019	177.96	65,795.65
2	2020	179.24	65,424.09
3	2021	180.26	65,795.65

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup, 2021

Timbulan sampah dapat terbentuk karena proses alami dan juga pola perilaku manusia dalam mengelola sampahnya. Di Kota Sukabumi kegiatan pemilahan sampah mulai dari rumah tangga dirasa belum memberikan hasil yang baik pada kondisi timbulan sampah yang berada di TPA Cikundul. Kepala seksi pengelolaan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi mengatakan “apabila sampah dapat terpilah di rumah tangga sebelum dibuang ke TPS, maka hendaknya pengurangan sampah bisa berdampak ke TPA Cikundul” (Firdaus 2021). Artinya, timbulan sampah yang meningkat dapat disebabkan oleh perilaku masyarakat berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Terdapat faktor partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dalam penelitian Hendra (2016) dijelaskan masyarakat yang kurang berperan serta dalam pengelolaan sampah disebabkan karena mereka belum mengetahui peraturan, pedoman, SOP yang ada dalam bidang pengelolaan sampah. Dari pernyataan tersebut diasumsikan bahwa permasalahan sampah diakibatkan adanya partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh indikator implementasi kebijakan.

Adapun rangkaian proses kebijakan, implementasi dapat mempengaruhi kelompok sasaran, dalam hal ini partisipasi masyarakat. Sama halnya kerangka hirarki proses kebijakan yang dikemukakan Bromley (1989) yaitu level kebijakan, organisasi dan operasional akan mempengaruhi implementasi kebijakan, yang selanjutnya implementasi mempengaruhi pola interaksi kelompok sasaran.



Gambar 1. Proses Kebijakan Sebagai susunan Hirarki

Sumber: Bromley (1989)



Kemudian, terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat. Penelitian dilakukan oleh Hernidyasari (2012) serta Nurmalasyiah dan Suryani (2018). Penelitian pertama, dilakukan di Desa Jatiwaringin Kabupaten Tabalong pada tahun 2012. Hasil penelitian mengatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah memiliki pengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan penelitian selanjutnya pada Tahun 2018 berada di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong. Hasil Penelitian mengatakan bahwa Implementasi Kebijakan tidak memiliki pengaruh positif terhadap partisipasi masyarakat.

Berdasarkan pada hirarki proses kebijakan yang dikemukakan Broomley (1989) bahwa implementasi kebijakan dapat mempengaruhi pola interaksi masyarakat, fenomena timbunan sampah yang mengalami kenaikan tiap tahunnya, serta adanya dua hasil penelitian terdahulu yang berbeda terkait pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat, maka perlunya penelitian lebih lanjut terkait bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah di Kota Sukabumi.

Adapun teori yang digunakan untuk mengukur implementasi kebijakan yaitu teori Edwards (1980) yang menjelaskan bahwa terdapat 4 dimensi implementasi kebijakan yang saling berhubungan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sedangkan partisipasi masyarakat yaitu teori Davis dan Newstorm (1989) yang mengemukakan tiga gagasan dalam partisipasi, diantaranya yaitu keterlibatan emosional dan mental, motivasi untuk berkontribusi, dan penerimaan tanggung jawab.

METODE

Desain Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melalui observasi, penyebaran angket, dan dokumentasi. Adapun populasi pada penelitian adalah masyarakat Kota Sukabumi dengan jumlah sampel 100 responden ($\alpha=0.1$) yang terbagi dari 7 Kecamatan di Kota Sukabumi.

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dan konsisten maka dilakukan uji validitas dan reliabilitas terhadap kuisioner penelitian. Analisis data dan uji hipotesis dilakukan secara parsial/individu pada tiap dimensi implementasi kebijakan (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi) terhadap partisipasi masyarakat dan secara simultan pada implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat menggunakan regresi linier sederhana. Kemudian, untuk mengetahui besaran pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) maka ditentukan Koefisien Determinasi (R^2) serta untuk mengetahui arah pengaruh variabel X terhadap Y ditentukan persamaan regresi dengan rumus $Y=a+bX$. a = konstanta, b = koefisien regresi.

PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Kuisioner dalam penelitian ini disebarkan kepada masyarakat Kota Sukabumi yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah di Wilayah Kota Sukabumi. Jumlah Sampel pada penelitian saat ini sebanyak 100 orang dengan karakteristik berdasarkan Kecamatan, Usia, Jenis Kelamin, Pendidikan, Pekerjaan, dan Lingkungan Rumah. Berikut merupakan uraian karakteristik responden dalam penelitian:

Tabel 2. Karakteristik Responden

No.	Karakteristik	Jumlah
1	<u>Kecamatan</u>	
	Citamiang	15
	Cikole	18
	Gunungpuyuh	14
	Cibereum	13
	Baros	11
	Lembursitu	12
Warudoyong	17	
2	<u>Usia</u>	
	17-20 Tahun	15
	21-30 Tahun	65
	31-40 Tahun	5
	41-50 Tahun	10
>50 Tahun	5	
3	<u>Jenis Kelamin</u>	
	Perempuan	52
	Laki-Laki	48
4	<u>Pendidikan</u>	
	SD	0
	SMP	2
	SMA	59
	D1/D2	0
	D3/S1	35
	S1/S2	4
5	<u>Pekerjaan</u>	49
	Pelajar/Mahasiswa	3
	Buruh/Petani	13
	Pegawai Swasta	4
	Pegawai Negeri	9
	Ibu Rumah Tangga	22
	Lain-Lain	
6	<u>Lingkunagn rumah</u>	43
	Gang	25
	Pinggir Jalan Raya	0
	Rumah Susun	29
	Komplek Perumahan	3
	Lain-Lain	

Sumber: Penelitian, 2022

Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas merupakan ukuran yang digunakan untuk menunjukkan tingkat validitas suatu kuisioner. Kuisioner dapat dikatakan valid, apabila seluruh instrument yang diujikan sesuai serta mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Pada pengujian validitas instrument, kriteria penilaian dapat diketahui dengan membandingkan r hitung dan r tabel. Bila r hitung $>$ r tabel, maka instrument dari penelitian tersebut dikatakan valid. Dan bila r hitung $<$ r tabel, maka instrument dari penelitian dikatakan tidak valid.

Penyebaran kuisioner dalam penelitian, berisikan 20 item pertanyaan yang terdiri dari variabel bebas (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) dan variabel terikat (partisipasi masyarakat). Kuisioner yang diberikan kepada 100 responden dilakukan melalui IBM SPSS 26 dengan cara mengkorelasi skor masing-masing item dengan skor totalnya. Nilai r table dengan taraf signifikan $\alpha = 0,1$ (10%), $df = N-2$ sehingga $df = 98$ sebesar 0,1654.

Tabel 3. Uji Validitas

Variabel		Item	R_{hitung}	R_{tabel}	Keterangan
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	1	0.856	0.1654	<i>Valid</i>
		2	0.896	0.1654	<i>Valid</i>
		3	0.883	0.1654	<i>Valid</i>
	Sumber Daya	4	0.832	0.1654	<i>Valid</i>
		5	0.809	0.1654	<i>Valid</i>
		6	0.804	0.1654	<i>Valid</i>
		7	0.750	0.1654	<i>Valid</i>
	Disposisi	8	0.829	0.1654	<i>Valid</i>
		9	0.896	0.1654	<i>Valid</i>
	Struktur Birokrasi	10	0.848	0.1654	<i>Valid</i>
		11	0.907	0.1654	<i>Valid</i>
Partisipasi Masyarakat		12	0.376	0.1654	<i>Valid</i>
		13	0.507	0.1654	<i>Valid</i>
		14	0.387	0.1654	<i>Valid</i>
		15	0.578	0.1654	<i>Valid</i>
		16	0.658	0.1654	<i>Valid</i>
		17	0.723	0.1654	<i>Valid</i>
		18	0.561	0.1654	<i>Valid</i>
		19	0.556	0.1654	<i>Valid</i>
		20	0.550	0.1654	<i>Valid</i>

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2022

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha melalui SPSS 26. Pengukuran reliabilitas Cronbach's Alpha mulai dari skala 0-1, dengan minimal value reliable yaitu 0.60 – 0.70 (Hair JR et al. 2010, 91). Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan melalui SPSS 26 untuk variabel X dan Y dapat dilihat/pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel		Reliability Statistic		Keterangan
		Cronbach's Alpha	N of Items	
Implementasi Kebijakan	Komunikasi	0.851	3	<i>Reliabel</i>
	Sumber Daya	0.811	4	<i>Reliabel</i>
	Disposisi	0.649	2	<i>Reliabel</i>
	Struktur Birokrasi	0.694	2	<i>Reliabel</i>
Partisipasi Masyarakat		0.692	9	<i>Reliabel</i>

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2022

Berdasarkan Tabel 4, instrument penelitian dengan variabel X yaitu implementasi kebijakan (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi) dan variabel Y yaitu Partisipasi Masyarakat memiliki Cronbach's Alpha > 0,6. Yang artinya, seluruh variabel dinyatakan reliabel dan dapat digunakan setiap saat.

Interprestasi Variabel Implementasi Kebijakan

Menurut Edwards (1980) Implementasi Kebijakan adalah “tahap pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan, seperti pengesahan undang-undang, penerbitan perintah eksekutif, dijatuhkannya keputusan pengadilan, atau diundangkannya aturan peraturan dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi orang-orang yang mempengaruhi”. Dalam tahap implementasi kebijakan perlunya komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi yang jelas. Berdasarkan akumulasi tanggapan responden atas item pertanyaan angket atau kusioner pada variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 5. Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

No	Dimensi	Indikator	Skor PerIndikator	Skor Perdimensi	Total
1	Komunikasi	Transmisi	385	1.049	3.787
		Kejelasan	334		
		Konsistensi	330		
2	Sumber Daya	Staff	366	1.392	
		Informasi	356		
		Kewenangan	344		
	Fasilitas	326			
3	Disposisi	Sikap pelaksana	345	644	
		Insentif	299		
4	Struktur Birokrasi	Standar Operasional	372	702	
		Penyebaran Tanggung jawab	330		

Sumber: Penelitian, 2022

Tabel di atas menunjukkan total skor tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 1 yaitu dimensi komunikasi mengenai indikator transmisi atau Pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan Pengelolaan Sampah yang berlaku di Kota Sukabumi dengan total skor 385. Dan total skor terendah pada item pertanyaan nomor 9 yaitu dimensi disposisi mengenai realisasi kebijakan insentif dengan

total skor 299. Dari sebelas item pertanyaan dengan jumlah dimensi sebanyak empat, maka dapat digambarkan tingkat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi yaitu:

Jumlah Skor Ideal = $11 \times 100 \times 5 = 5.500$.

Tingkat implementasi kebijakan, adalah $3.387 : 5.500 \times 100\% = 61.58\%$.

Hasil penelitian memperoleh data sebesar 61.58% pada implementasi kebijakan. Dapat diartikan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Sukabumi, yaitu Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah beserta turunannya memiliki tingkat implementasi yang tinggi. Sebagian besar masyarakat Kota Sukabumi, dalam hal ini sudah mengetahui dan memahami isi kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku. Sumberdaya kebijakannya dapat memenuhi sesuai kebutuhan masyarakat misalnya dalam pembagian petugas angkut sampah yang cukup merata di berbagai wilayah. Peraturan yang berlaku di Kota Sukabumi pun dapat diterapkan di lingkungan tempat tinggal masyarakat Kota Sukabumi yang artinya peraturan tersebut memungkinkan para implementor dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dari sebelas indikator, insentif mendapatkan nilai cukup tinggi/ sedang. Sebagian masyarakat belum merasakan adanya kebijakan insentif. Padahal kebijakan insentif kepada perseorangan atau individu masyarakat sudah tertuang pada pasal 37 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda Kota Sukabumi No. 17 tahun 2011 dijelaskan bahwa insentif adalah upaya untuk memotivasi secara positif kepada masyarakat agar menaati peraturan Pengelolaan Sampah, hal tersebut guna meningkatkan pemeliharaan lingkungan.

Interprestasi Variabel Partisipasi Masyarakat

Menurut Davis & Newstorm (1989) partisipasi masyarakat adalah “keterlibatan mental dan emosi individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta dalam tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab untuk mereka sendiri”. Dalam definisi tersebut terdapat tiga gagasan penting dalam partisipasi yaitu keterlibatan, kontribusi dan responsibilitas/pertanggung jawaban. Akumulasi tanggapan responden atas item pertanyaan angket atau kusioner pada variabel partisipasi masyarakat pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

Tabel 6. Akumulasi Tanggapan Responden Mengenai Variabel Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

No	Dimensi	Indikator	Skor PerIndikator	Skor PerDimensi	Total
1	Keterlibatan Emosi dan Mental	Pikiran	264	1.096	3.306
		Perasaan	383		
		Perilaku	449		
2	Motivasi Kontribusi	Inisiatif	377	1.050	
		Kreatifitas	338		
		Kontribusi tenaga	335		
	Menerima Tanggung Jawab	Pelaksanaan Kewajiban	372	1.160	
		Mewujudkan keberhasilan	424		
		Menerima Sanksi	364		

Sumber: Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel diatas, total skor tertinggi terdapat pada item pertanyaan nomor 14 yaitu dimensi keterlibatan emosi dan mental mengenai indikator perilaku dengan skor 449. Dan total skor terendah pada item pertanyaan nomor 12 yaitu dimensi keterlibatan emosi dan mental mengenai masyarakat yang kurang kesadarannya dalam membuang sampah dengan total skor 264. Dari sembilan item pertanyaan dengan jumlah dimensi sebanyak tiga, maka dapat digambarkan tingkat partisipasi masyarakat yaitu:

Jumlah skor ideal = $9 \times 100 \times 5 = 4.500$.

Tingkat partisipasi masyarakat, adalah $3.306:4.500 \times 100\% = 73.46\%$.

Indikator pikiran dinilai cukup. Indikator tersebut diukur dengan kesadaran masyarakat dalam membuang sampah. Sebagian masyarakat Kota Sukabumi secara sadar membuang sampah tidak pada tempatnya dalam keadaan terdesak, misal fasilitas sampah yang terlalu jauh untuk dijangkau, walaupun informasi pengelolaan sampah sudah jelas dalam peraturan. Perilaku tersebut dapat menimbulkan timbunan sampah di tempat pembuangan sampah liar, dan jika tidak ditangani berdampak pada kerusakan lingkungan. Namun, secara keseluruhan sebagian besar masyarakat Kota Sukabumi sudah berpartisipasi dengan baik. Inisiatif dan kreativitas banyak dilakukan oleh masyarakat Kota Sukabumi, misalnya berinovasi dari limbah sampah. Kemudian, sebagian besar masyarakat Kota Sukabumi memiliki keinginan untuk menerima tanggung jawab dengan melaksanakan kewajiban sebagai masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pengaruh Implementasi Kebijakan yang Berdasar Pada Dimensi Kpmunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi Terhadap Partisipasi Masyarakat

Berikut adalah ringkasan hasil analisis dan uji hipotesis pengaruh implementasi kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat di Kota Sukabumi:

Tabel 7. Hasil Analisis dan Uji Hipotesis

No	Variabel/Dimensi	R ²	Uji t	Uji F	Y=a+bX
1	Komunikasi	7.9%	2.890	5.108	Y = 27.468+0.529X
2	Sumber Daya	16.6%	4.420		Y = 23.528+0.682X
3	Disposisi	13%	3.833		Y = 25.075+1.234X
4	Struktur Birokrasi	10%	3.307		Y = 26.465+0.934X
5	Implementasi Kebijakan	14.8%	4.134		Y = 23.770+0.135X

Sumber: Olahan Data SPSS 26, 2022

Dari hasil perhitungan SPSS 26 diperoleh bahwa t_{hitung} dimensi Komunikasi, Disposisi, Sumber Daya dan Struktur Birokrasi lebih besar dari pada t_{tabel} 1.66023, sehingga H_a diterima dan H_o ditolak. Dari perhitungan tersebut dapat dikatakan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada implementasi kebijakan adalah dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sehingga, Dinas Lingkungan Hidup beserta Pemerintah Daerah perlu memperhatikan lebih lanjut terkait keempat dimensi dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah terhadap partisipasi masyarakat. Kemudian, dari perhitungan uji signifikansi (F) diperoleh F_{hitung} 5.108 > F_{tabel} 1.91. Artinya H_a diterima dan H_o ditolak yaitu implementasi kebijakan berdasar pada dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara bersama-sama mempengaruhi partisipasi masyarakat. Untuk mengetahui besaran pengaruh implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat, maka dilakukan uji Koefisien Determinasi (R²). Data yang diperoleh data sebesar 14.8%. Artinya implementasi kebijakan memiliki pengaruh sebesar 14.8% terhadap partisipasi



masyarakat dan sisanya 85.2% dipengaruhi oleh variabel atau faktor lain yang tidak masuk dalam penelitian.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Bromley (1989) bahwa implementasi mempengaruhi pola interaksi kelompok sasaran, yaitu salah satunya masyarakat. Artinya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang berlaku di Kota Sukabumi. Dengan besaran pengaruh implementasi kebijakan secara bersama-sama sebesar 14.8%. Penelitian ini juga menghasilkan jawaban penelitian yang sama dengan penelitian Yeni Hernidyasari pada tahun 2012 yang mengatakan terdapat pengaruh signifikan antara implementasi kebijakan terhadap partisipasi masyarakat. Yang menjadi perbedaan dalam penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu adanya analisis data dan uji hipotesis di setiap dimensi dalam implementasi kebijakan. Dalam penelitian menunjukkan bahwa setiap dimensi dalam implementasi kebijakan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap partisipasi masyarakat dengan nilai R^2 tertinggi yaitu pada dimensi Sumber Daya.

KESIMPULAN

Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Sukabumi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan kategori nilai interpretasi implementasi kebijakan yang tinggi yaitu 61,58%. Dan, pada variabel partisipasi masyarakat memiliki nilai interpretasi yang diperoleh sebesar 73,46%. Walaupun dalam hasil penelitian menunjukkan sebagian masyarakat Kota Sukabumi sudah melaksanakan kegiatannya sesuai pedoman serta implementasi kebijakan terlaksana dengan baik. Namun, timbulan sampah yang terus meningkat disebabkan oleh sampah yang tertimbun oleh sebagian individu yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah.

Kemudian, berdasarkan uji hipotesis diperoleh bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah berdasar pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (X) secara bersama-sama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Y) di Kota Sukabumi. Dengan besaran pengaruh yaitu 14.8% dan sisanya dipengaruhi faktor di luar penelitian. Kemudian secara parsial ditemukan bahwa komunikasi ($X_{1.1}$) memiliki besaran pengaruh 7,9% terhadap partisipasi masyarakat (Y). Sumber daya ($X_{1.2}$) memiliki besaran pengaruh 16,6% terhadap partisipasi masyarakat (Y). Disposisi ($X_{1.2}$) memiliki besaran pengaruh 13% terhadap partisipasi masyarakat (Y). Dan struktur birokrasi ($X_{1.2}$) memiliki besaran pengaruh 10% terhadap partisipasi masyarakat (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar. 2012. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 1(1): 1–11. https://www.researchgate.net/publication/277844111_Implementasi_Kebijakan_Apa_Mengapa_dan_Bagaimana.
- Anderson, James E. 1979. *Public Policy-Making*. 2nd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Bromley, Daniel W. 1989. *Economic Interest And Institutions: The Conceptual Foundations of Public Policy*. New York: Basil Blackwell.
- Davis, Keith, and John W Newstorm. 1989. *Human Behavior at Work: Organizational Behavior*. 8th ed. New York: McGraw Hill.
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton DC: CQ Press.
- Firdaus, Iyus PWI. 2021. "DLH Minta Masyarakat Disiplin Memilah Dan Buang Sampah Tepat Waktu." *Pelita Sukabumi*. <https://pelitasukabumi.com/2021/03/05/13113/kota-sukabumi/dlh->

- minta-masyarakat-disiplin-memilah-dan-buang-sampah-tepat-waktu/.
- Hair JR, Joseph F., William C. Black, Barry J. Rabin, and Rolph E. Anderson. 2010. *Multivariate Data Analysis*. 7th ed. New Jersey: Prentice Hall, Upper Saddle River.
- Hendra, Yulia. 2016. "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah Di Indonesia Dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah." *Aspirasi* 7(1): 77–91.
- Hernidyasari, Yeni. 2012. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Di Desa Jatiwaringin Kabupaten Tangerang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Kementrian Lingkungan Hidup. 2021. "SIPSN." *Sistem Pengelolaan Sampah Nasional*. <https://sipsn.menlhk.go.id>.
- Lester, James P. 1996. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. Minneapolis/St. Paul: West Pub.
- Nurmalasyiah, and Lilis Suryani. 2018. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Terhadap Partisipasi Masyarakat Dan Efektivitas Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis* 2(1): 39–53. <http://jurnal.stiatabalong.ac.id>.
- Peraturan Pemerintah Daerah kota Sukabumi. 2021. *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Peraturan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. 2011. *Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. 2018. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah*.